

Pemberdayaan Karang Taruna : Optimalisasi Melalui Program Pelatihan Pagu Usulan Partisipatif Masyarakat (PUPM) Di Kabupaten Sleman

by Kirana Rilla Pratama

Submission date: 26-Jun-2024 08:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2408721229

File name: SRJ_-_VOLUME._2_NO._3_JUNI_2024_Hal._252-258..pdf (1.01M)

Word count: 2220

Character count: 15348

Pemberdayaan Karang Taruna : Optimalisasi Melalui Program Pelatihan Pagu Usulan Partisipatif Masyarakat (PUPM) Di Kabupaten Sleman

Kirana Rilla Pratama

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STAPMD), Yogyakarta, Indonesia

Email : kiranarila23@gmail.com

Abstract The aim of this research is to find out how optimal training is based on the community participatory proposed ceiling program (PUPM) for youth organizations that has been carried out in Sleman Regency. The research method used is descriptive qualitative. The research concluded that the empowerment of youth organizations through the community participatory proposed ceiling training program (PUPM) could be said to be not optimal because there were still several things that had not been paid attention to, such as a lack of careful planning (target age, implementation time, no monitoring and evaluation, and opportunities for applying knowledge obtained) as well as the lack of awareness of youth organization members regarding the use of programs provided by the government.

Keywords: Karang Taruna, Empowerment, PUPM

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa optimal pelatihan berdasarkan program pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM) untuk karang taruna yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan karang taruna melalui program pelatihan pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM) dapat dikatakan tidak optimal karena masih terdapat beberapa hal yang kurang dicermati seperti kurangnya perencanaan yang matang (target usia, waktu pelaksanaan, tidak ada monitoring dan evaluasi, dan kesempatan penerapan ilmu yang didapat) serta kurangnya kesadaran dari anggota karang taruna dalam pemanfaatan program yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Karang Taruna, Pemberdayaan, PUPM

LATAR BELAKANG

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Permensos No 25 Tahun 2019). Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perubahan positif di tingkat lokal. Pada saat ini banyak pemuda yang masih menghadapi tantangan seperti pengangguran dan kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pelatihan menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam pemberdayaan pemuda melalui karang taruna. Pelatihan yang dimaksud dapat mencakup berbagai bidang seperti kewirausahaan, teknologi informasi, keterampilan teknis, dan kepemimpinan. Pemberdayaan melalui pelatihan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga membawa dampak positif bagi komunitas secara keseluruhan. Namun, pemberdayaan karang taruna melalui pelatihan tidaklah tanpa tantangan, keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan, merupakan beberapa kendala yang sering dihadapi.

Dengan adanya tantangan tersebut, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Dalam

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 26, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Kirana Rilla Pratama kiranarila23@gmail.com

upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis dan non-teknis kepada pemuda. Salah satu program Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelatihan kepada karang taruna melalui program pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM). PUPM merupakan pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk kapanewon/kecamatan guna mengakomodir usulan masyarakat melalui jalur musrenbang RKPD di kapanewon baik yang nantinya dilaksanakan oleh kapanewon maupun perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program yang didanai dari PUPM merupakan program yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sleman maupun oleh kapanewon. Tujuan dari adanya PUPM adalah untuk mengakomodir usulan partisipatif atau usulan yang berasal dari proses perencanaan bottom up dan top down. Pada proses pengusulan program diperlukan kamus sebagai panduan apa saja yang bisa diusulkan melalui PUPM agar selaras dengan tema dan prioritas pembangunan daerah, kamus tersebut akan dibuat oleh masing-masing instansi sesuai dengan yang mereka ampu. ² Partisipasi masyarakat di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman dalam perencanaan pembangunan menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan pembangunan dan menangani permasalahan yang berada di Kabupaten Sleman.

Pemberdayaan adalah alat penting dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberdayakan individu dan komunitas, kita ⁹ dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera. Pemberdayaan sering kali melibatkan pemberian ⁹ akses ke sumber daya, informasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan dapat ⁷ terjadi di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. ² Serta partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan melalui pemberdayaan. Dengan adanya pelatihan melalui program PUPM, anggota Karang Taruna dapat meningkatkan kompetensi pribadi mereka, memperkuat jaringan sosial, dan mendapatkan ⁹ pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola proyek-proyek yang berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Melalui penelitian ini, peneliti tertarik menganalisis bagaimana optimalisasi pemberdayaan karang taruna melalui pelatihan berdasarkan ² pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM) di Kabupaten Sleman.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses di mana individu atau kelompok memperoleh kekuatan, kemampuan, dan kepercayaan diri untuk mengendalikan hidup mereka dan membuat keputusan yang mempengaruhi mereka. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi. Pemberdayaan melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut, Subejo dan Narimo (Theresia,dkk, 2015: 121) mengartikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah memberikan individu atau kelompok kemampuan dan kesempatan untuk mengendalikan kehidupan mereka, membuat keputusan yang mempengaruhi mereka, serta berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian dengan adanya pemberdayaan juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan.

3. Tahap Pemberdayaan

Suatu proses belajar dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat dilakukan secara bertahap. Menurut Teguh (2004 : 83) tahap yang harus dilalui meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemauan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemauan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut. Penelitian ini menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologi (Moleong, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sleman memiliki 86 kalurahan yang mana di masing-masing kalurahan terdapat lembaga sosial karang taruna. Karang Taruna merupakan salah satu lembaga sosial sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial yang berperan menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Instansi yang mengampu terkait karang taruna yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Setiap tahunnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan rapat teknis terkait program pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM) sebelum nantinya masing-masing kapanewon/kecamatan akan menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah, tujuan dari adanya musrenbang adalah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir ke dalam proses perencanaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan pemerintah setempat. Pada Pemerintah Kabupaten Sleman saat musrenbang akan dibahas terkait dengan pagu usulan partisipatif masyarakat atau sering disebut dengan PUPM, terdapat banyak kamus PUPM yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yang mana kamus tersebut sudah disesuaikan dengan permasalahan yang ada dimasyarakat mulai dari pelatihan hingga pembangunan infrastruktur.

Pembuatan kamus terkait pelatihan karang taruna merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh dinas pengampu karang taruna, dengan adanya pembuatan kamus tersebut merupakan cara pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap karang taruna. Salah satu kegiatan pemberdayaan karang taruna yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengadakan pelatihan berdasarkan kebutuhan generasi muda saat ini dengan tujuan untuk menambah skill guna mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan serta dilakukan dengan harapan menjadikan generasi muda yang produktif, terampil, responsive dan berdaya guna bagi diri dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pelatihan berdasarkan program pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM) telah dilaksanakan setiap tahunnya oleh dinas terkait salah satunya yaitu dinas sosial. Dinas Sosial Kabupaten Sleman setiap tahunnya membuat kamus untuk karang taruna, namun pada penelitian ini akan membahas pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan kamus yang dibuat yaitu tentang marketing online dan konten kreatif. Tujuan dari kamus PUPM yang dibuat oleh Dinas Sosial Sleman ditangkap baik oleh beberapa pemangku kepentingan di Kapanewon dan Kalurahan sehingga pada 2023 Dinas Sosial Sleman dapat melaksanakan pelatihan PUPM di 24 Kalurahan (Sidoluhur, Sidakarto, Sidomulyo, Sumberagung, Caturtunggal, Sedangtirto, Balecatur, Purwomartani, Sidomoyo, Trihanggo, Donokerto, Pondokrejo, Wonokerto, Banyuraden, Tlogoadi, Wukirharjo, Balecatur, Margokaton, Umbulharjo, Selomartani, Tirtomartani, Glagaharjo, Tridadi, Kalitirto) dan 4 Kapanewon (Berbah, Turi, Cangkringan, Mlati) namun dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak kalurahan dan kapanewon yang belum mengusulkan pelatihan untuk karang taruna, salah satu alasan yang ditemukan oleh peneliti adalah pemangku kepentingan di Kalurahan atau Kapanewon masih ada yang tidak menyadari tujuan dan manfaat dari memberdayakan lembaga karang taruna yang ada di wilayahnya.

Pelatihan marketing online dan konten kreatif merupakan suatu kegiatan penting yang harus diikuti oleh generasi muda dalam menghadapi perkembangan era digital saat ini karena dengan membekali generasi muda keterampilan dan pengetahuan akan lebih bermanfaat dikemudian hari serta pelatihan tersebut tidak hanya membantu individu untuk menjadi lebih terampil dalam memasarkan produk atau jasa secara online, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan digital yang cepat. Pelatihan secara sederhana didefinisikan oleh Pramudyo (2017) sebagai: “Proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya”. Yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya empat hal yang harus diperhatikan. Yaitu, proses pelatihan, peserta pelatihan, kinerja, dan pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut, adanya program pelatihan melalui PUPM seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh karang taruna karena adanya program merupakan usulan dari masyarakat atau lembaga karang taruna itu sendiri. Namun pada saat pelaksanaan terdapat hambatan seperti partisipasi yang kurang dari karang taruna yaitu pada saat pelatihan diumumkan dan dibuka pendaftaran melalui link hingga batas akhir pendaftaran kuota peserta tidak terpenuhi di beberapa lokasi. Kesadaran akan manfaat dari pelatihan juga belum disadari oleh sebagian dari anggota karang taruna, sebagian dari mereka mengikuti pelatihan karena adanya fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara seperti transport, alat pelatihan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan hambatan sehingga pelaksanaan pelatihan tidak berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Dinas Sosial Sleman. Sehingga dalam pemberdayaan karang taruna melalui program pelatihan pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM) dapat dikatakan tidak optimal karena kurangnya perencanaan yang matang (target usia, waktu pelaksanaan, tidak ada monitoring dan evaluasi, dan kesempatan penerapan ilmu yang didapat) serta kurangnya kesadaran dari anggota karang taruna. Tanpa adanya evaluasi yang teratur dan umpan balik dari peserta pelatihan, sulit untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan tersebut sudah optimal atau belum dan bagaimana membuat perbaikan yang diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perubahan positif di tingkat lokal. Kemudian pemberdayaan adalah alat penting dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberdayakan karang taruna dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera. Melalui program PUPM masyarakat dapat mengakses anggaran yang ada di Pemerintah setempat (Kalurahan/Kapanewon) untuk pembangunan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, melalui pelatihan program pagu usulan partisipatif masyarakat (PUPM) seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggota karang taruna guna menjadi bekal menghadapi perkembangan era digital saat ini. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga tujuan dari adanya pemberdayaan karang taruna melalui pelatihan program PUPM tidak optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Theresia, dkk. (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Teguh, S. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Pramudyo, G. N. (2017). Etika Ilmiah dan Penelitian. Malang: Universitas Brawijaya.
- Zubaedi. (2007). Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Agus, Ferdinan, & Anggi Rahajeng. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan program dan kegiatan kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2017: Pagu Usulan Partisipatif Masyarakat (PUPM). *Jurnal Ekonomika Terapan*.

Pemberdayaan Karang Taruna : Optimalisasi Melalui Program Pelatihan Pagu Usulan Partisipatif Masyarakat (PUPM) Di Kabupaten Sleman

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
2	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	3%
3	journal-stiayappimakassar.ac.id Internet Source	2%
4	api.repository.poltekesos.ac.id Internet Source	2%
5	nevitaindayani.blogspot.com Internet Source	2%
6	ejournal.unib.ac.id Internet Source	2%
7	sipeg.unj.ac.id Internet Source	2%
8	langenharjo.kendalkab.go.id Internet Source	1%

9	Utomo, Edy Setyo. "Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
10	docplayer.info Internet Source	1 %
11	jurnal.uii.ac.id Internet Source	1 %
12	nasional.kompas.com Internet Source	1 %
13	eprints.ukmc.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
15	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On